STANDAR PELAYANAN – AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA – MADIUN
2015

PERMENHUB NO. 148 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1541, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA AKADEMI
PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya, dan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun diperlukan adanya Standar Pelayanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 8 Tahun 2006; KEPPRES No. 187 Tahun 2004; PERPRES No. 9 Tahun 2005; PERPRES No. 10 Tahun 2005; PERMENHUB No. 18 Tahun 2011; PERMENHUB No. 20 Tahun 2011; PERMENHUB No. 21 Tahun 2011; PERMENHUB No. 22 Tahun 2011; PERMENHUB No. 23 Tahun 2011; PERMENHUB No. 30 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun meliputi Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif Produk Pelayanan, Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2015 dan ditetapkan tanggal 1 Oktober 2015.
Lampiran : 53 hlm.